JURNAL ISSN: 2338-9613

Administrasi Publik

FISIP UNSRAT

NOMOR : 003 VOLUME : III SEPTEMBER 2014

JAP

Analisa Kinerja Badan Pengelola Kebersihan Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Manado
Oleh rully mambo

Peranan Sosial Budaya Masyarakat Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa Di Wilayah Kecamatan Tuminting Kota Manado Oleh Selvie M. Tumengkol

Hubungan Antara Gaya Manajemen Dan Efektivitas Organisasi Di Kantor Administrator Pelabuhan Bitung
Oleh Sofia A. P. Sambul

Hubungan Antara Pengawasan Manajerial Dan Efisiensi Kerja Dalam Birokrasi (Suatu Studi Di Sekretariat Daerah Kota Bitung)
Oleh Max Pangkey

Peranan Komunikasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
Oleh Anton Boham

Peran Kepemimpinan Dan Disiplin Pegawai Terhadap Kinerja Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Oleh Novva Plangiten

Pembinaan Moral Kerja Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kator Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
Oleh Marlien T. Lapian

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa
Oleh Juliana Tumiwa

Peranan Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dikecamatan Dimembe
Oleh Antje C. Sumilat

Perencanaan Partisipatif Sebagai Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Pada Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang)
Oleh Jouke J. Lasut

Penerbit dan Alamat Redaksi :
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNSRAT
Jalan Kampus Unsrat Bahu – Manado 95115
Telp. 0431-862586, Fax. 0431-862586. Laman http://unsrat.ac.id
Contact Persont : 081221007654/ 081325600308

Pengelola Jurnal Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Sam Ratulangi

PEMBINA	:	Dekan FISIP UNSRAT
PENANGGUNGJAWAB	:	Dra. Mieke Roring, MA
		Dra. F. Daicy Lengkong, M.Si
DEWAN PAKAR	:	Prof. Dr. Drs. Patar Rumapea, M.Si
PIMPINAN REDAKSI	:	Drs. J. Ruru, M.Si
SEKRETARIS REDAKSI	:	Drs. Burhanuddin Kiyai, M.Si
DEWAN REDAKSI	:	Dr. Dra. J. Rares, M.Si
		Dr. Dra. Femmy D. G. Tulusan, M.Si
		Jericho D. Pombengi, S.Sos, M.Si
MANAJER UMUM	:	Rully Mambo, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi i
Daftar Isi ii

Analisa Kinerja Badan Pengelola Kebersihan Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Manado
Oleh rully mambo 1

Peranan Sosial Budaya Masyarakat Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa Di Wilayah Kecamatan Tuminting Kota Manado
Oleh Selvie M. Tumengkol 10

Hubungan Antara Gaya Manajemen Dan Efektivitas Organisasi Di Kantor Administrator Pelabuhan Bitung
Oleh Sofia A. P. Sambul 18

Hubungan Antara Pengawasan Manajerial Dan Efisiensi Kerja Dalam Birokrasi (Suatu Studi Di Sekretariat Daerah Kota Bitung)
Oleh Max Pangkey 26

Peranan Komunikasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
Oleh Anton Boham 34

Peran Kepemimpinan Dan Disiplin Pegawai Terhadap Kinerja Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa
Oleh Novva Plangiten 44

Pembinaan Moral Kerja Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kator Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
Oleh Marlien T. Lapian 57

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa
Oleh Juliana Tumiwa 67

Peranan Koordinasi Antar Perangkat Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dikecamatan Dimembe
Oleh Antje C. Sumilat 74

Perencanaan Partisipatif Sebagai Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Pada Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang)
Oleh Jouke J. Lasut 84

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DI KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA

Oleh

Juliana Tumiwa

Abstract: Human resource capacity of the District government officials are still shortcomings, such as: half of high school education authorities; officers generally do not have the technical education in the field of administration and generally do not yet have adequate education and training. The purpose of this study was to determine the effect of the quality of the District government of personnel resources to the implementation of the regional autonomy policy, especially in the District Sonder. The method used in this research is the nature of explanation. The analytical method used is a quantitative method. In this study, the population of the entire apparatus of government is the District Sonder, amounting to 33 people. Analysis techniques used in this study is the statistical analysis. The results showed that the quality of human resources has a positive influence on the implementation of the decentralization policy, the determinants of power by 34.70%, meaning that the successful implementation of policies increased by 34.70% of regional autonomy is determined and influenced by the quality of human resources Apparatus, while the remaining 65.30% is determined or influenced by other factors

Keywords: Quality Resources, Government Agencies, Policy Implementation, Regional Autonomy

PENDAHULUAN

Seperti diketahui bahwa sejak tahun 1999, bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Pemrintahan Daerah baru yaitu UU No 22 tahun 1999 yang praktis mulai dilaksanakan selama kurang lebih 4 tahun, Undang-Undang pemerintahan daerah tersebut dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan yang terjadi, kemudian direvisi dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Dalam perkembangannya UU No.32 ini direvisi dengan ditetapkannya UU No.12 tahun 2008 tentang perubahan atas UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Apabila dicermati,pada dasarnya misi dan tujuan dari kebijakan otonomi daerah tersebut adalah : Pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan public dan kesejahteraa masyarakat; Kedua, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya local/daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan Ketiga, untuk memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemeritaha dan pembangunan (Mardiasmo,2002).

Tercapainya tujuan kebijakan otonomi daerah tersebut tentu akan sangat ditentukan oleh keberhasilan proses implementasinya, dimana pemerintah daerah akan merupakan salah satu unsur penentu keberhasilan tersebut. proses implementasi otonomi daerah ini menurut Syaukani dkk(2002) paling utama mencakup tiga aspek,yaitu : (1) interpretasi dari kebijakan otonomi daerah melalui

sejumlah peratura darah; (2) penciptaan organisasi perangkat daerah sebagai "iplementor agency" kebijakan tersebut; (3) dukungan sumber daya manusia, keuangan, maupu sarana dan prasarana. Ketiga aspek tersebut harus diberdayakan semaksimal mugkin guna mempercepat pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana telah disebutkan diatas antara lain sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya aparatur kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari daerah otonom. Sebagaiman disebutkan dalam UUNo.32 tahun 2004 jo UU No.12 tahun 2008, bahwa kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang dipimpin oleh Camat, yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas tersebut, kecamatan mempunyai tugas umum pemerintahan yaitu : mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketetiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, dan kegiatan pemerintahan di kecamatan; membina penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan; dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa/ Kelurahan.

Dengan kedudukan sebagai perangkat daerah yang memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah , serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa kecamatan dengan seluruh aparatnya akan turut menentukan bagi keberhasilan pemerinta daerah Kabupaten/ Kota dalam implementasi kebijakan otonomi daera, dengan kata lain Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah akan memegang peranan yang turut menentukan bagi terciptanya implementasi kebijakan otonomi daerah yang efektif dan efisien.

Peranan kecamatan tersebut menjadi bertambah penting bila dilihat dari kedudukan Kecamatan sebagai perangkat daerah merupakan organisasi terdepan dalam memberikan pelayanan public. Seperti yang dikatakan oleh Wasistiono(2002), bahwa Kecamatan menjalankan misi pelayanan yang diemban sebagai unsure lini kewilayahan. Sebagai unsure lini kewilayahan itu, Camat menjalankan tugas pokok sebagai lini, yaitu " to do, to act" artinya kegiatan Camat berserta jajarannya bersifat opersiaonal, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Keberhasilan organisasi Kecamatan dalam mengemban tugas yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah tersebut,

tentunya akan turut ditentukan antara lain oleh kemampuan aparat pemerintah kecamatan dalam menginterpretasikan tugas-tugas tersebut dalam berbagai kebijaksanaan operasional, kemudian mengaktualisasikannya dalam tindakan-tindakan nyata. Dalam kaitan inilah maka factor sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan akan sangat penting dan menentukan.

Dari pengamatan yang dilakukan, khususnya dikecamatan Sonder, nampaknya kinerja pemerintah Kecamatan dalam implementasi otonomi daerah yang merupakan lingkup kewenangannya belum maksimal. Hal itu dapat diindikasikan dengan beberapa kenyataan seperti : (1) belum optimalnya pelaksanaan pelayanan public, seperti pelayanan administrasi kependudukan, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Perizinan yang belum sepenuhnya berjalan efisien, efektif responsive dan akuntabel; (2) pengelolaan sumber-sumber daya local, baik SDM maupun sumber daya lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas belum berjalan secara optimal; (3) peran pemerintah kecamatan dalam memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan belum dapat dilakukan secara optimal; (4) belum maksimalnya penyelenggaraan pengurusan dan pengaturan urusan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, social, lingkungan hidup,pertanahan, kependudukan, dan lain-lain; serta belum maksimalnya penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa.

Dilain pihak dari hasil pengamatan ataupun data yang diperoleh menunjukkan bahwa kapasitas kualitas sumber daya manusia dari aparat pemerintah Kecamatan masih terdapat kelemahan-kelemahan, seperti : separuh aparat berpendidikan SLTA; pada umumnya para aparat tidak memiliki pendidikan teknis dibidang pemerintahan atau belum pernah diberikan pembekalan teknhis dibidang pemerintahan khususnya menyangkut otonomi daerah; dan pada umumnya belum memiliki pendidikan dan pelatihan yang memadai, baik Diklat Penjenjangan maupun Diklat teknis. Kelemahan lainnya dari kualitas sumber daya aparat pemerintah Kecamatan adalah pada aspek sikap mental seperti : tidak suka bekerja keras, kurang menghargai waktu,kurang berdisiplin, dan kurang berkreativitas dalam melaksanaka tugas. Beberapa kelemahan SDM aparatur tersebut menyebabkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Kecamatan belum berjalan dengan optimal.

Para ahli atau teoritisi maupun para praktisi di bidang sumber daya manusia pada umumnya berpendapat bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya organisasi yang terpenting dalam mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditentukan. Akan tetapi seperti dikatakan oleh Notoatmodjo (1992), bahwa meskipun kuantitas atau jumlah sumber daya manusia itu penting, namun yang terpenting adalah

factor kualitas yang menyankut kualitas fisik dan kualitas non fisik.

METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat eksplanasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif

B. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh aparat pemerintah Kecamatan Sonder yang berjumlah 33 orang. Arikunto (2006) mengatakan apabila jumlah populasinya kecil atau dibawah 100 unit, maka sebaiknya tidak dilakukan penarikan sampel sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

C. Variabel *Penelitian* dan *Definisi* Operasional

Dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu :

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan, yang didefinisikan sebagai kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap aparatur pemerintah Kecamatan dalam hubungan dengan pelaksanaan pekerjaan,tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara sebagian urusan otonomi daerah, dan tuas umum pemerintahan di Kecamatan. Variabel ini diukur melalui indicator : Kemampuan pengetahuan; Kualitas Kecakapan; dan Kualitas sikap mental dan kepribadian.
2. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, yang didefinisikan sebaai pelaksanaan penyelengaraan urusan-urusan otonomi daerah di tingkat Kecamatan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dan seluruh jajarannya. Variabel ini diukur dari indicator : Efisiensi, Efektivitas, responsivitas, responbilitas, transparansi, dan akuntabilitas.

D. Instrumen dan Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer didapat melalui daftar pertanyaan (kuesioner) dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian documentasi.

E. Teknik Analisis data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis statistic, sebagai berikut :

1. Analisa Statistik Deskriptif, digunakan untuk mengetahui kondisi variabel-variabel penelitian. Analisis ini mengggunakan teknik analisis distribusi frekuensi dan persentase dengan rumus :

$$p = \frac{f}{n} x100\%$$

2. Analisis Statistik Inferensial, yaitu analisa regresi linier sederhana dan korelasi sederhana.
   a. regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan dan variabel Implementasi

Kebijakan Otonomi Daerah. Yang dinyataka dengan persamaan regresi :

$$\acute{Y} = a + bX$$

b. korelasi sederhana, digunakan untuk mengetahui derajat korelasi dan besar determinasi atau besar pengaruh variabel Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan terhadap variabel Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Rumus korelasi product moment :

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2]\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

c. Kriteria penerimaan hipotesis dengan analisa statistic tersebut adalah pada taraf α=0.01 (1%) atau pada taraf kepercayaan 99%. (Sudjana, 1996)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian statistic linier sederhana maupun analisa korelasi sederhana yang telah dikemukakan, diperoleh angka-angka yang memberi petunjuk bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kecamatan Sonder. Hasil dari pada analisis linier sederhana dan korelasi sederhana tersebut, dapat dibuktikan melalui pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis regresi linier sederhana mengenai pengaruh kualitas SDM aparatur terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah, diperoleh persamaan regresi : $\acute{Y} = 15.46 + 0.5824X$. pada persamaan regresi tersebut diperoleh nilai koefisien konstanta a = 15.46 dan nilai koefisien arah regresi b = 0.5824. Ini menunjukkan bahwa kualitas SDM aparatur berpengaruh positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah sebesar 1 : 0.5824, artinya setiap peningkatan kualitas kualitas SDM aparatur sebesar skala 1 unit akan menyebabkan peningkatan keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah sebesar 58.24%. Dengan kata lain, jika kualitas SDM aparatur bertambah besar 100% maka peningkatan keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah sebesar 58.24%. jika kualitas bertambah SDM tidak bertambah atau tetap pada posisi sekarang, maka kebehasilan implementasi kebijakan hanya sebesar 15.46 unit. Dengan demikian, kualitas SD aparatur dapat *dijadikan sebagai salah satu factor* dalam memprediksi peningkatan keberhasilan implementasi otonomi daerah pada masa yang akan datang. *Hasil pengujian linieritas dan* keberartian regresi dengan uji statistic F menunjukkan bahwa pengaruh kualitas SDM aparatur terhadap keberasilan implementasi kebijakan otonomi daerah yang dinyatakan

dengan persamaan regresi $\acute{Y} = 15.46 + 0.5824X$ adalah berbentuk linier dan sangat berarti pada taraf signifikan 0.01 atau taraf kepercayaan 99%. Dimana hasil uji linieritas regresi diperoleh bahwa nilai F_{hitung} lebih kecil dari nilai F_{kritik} ($F_{hit} < F_{0.01} = 2.43$), sedangkan hasil uji keberartian regresi diperoleh bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{kritik} ($F_{hit} = 16.40 > F_{0.01} = 7.01$).

2. Berdasarkan hasil analisis korelasi sederhana (product moment) mengenai besar pengaruh kualitas SDM aparatur terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah, diperoleh nilai koefisien korelasi r = 0.5891da koefisien determinasi $r^2 = 0.3470$. Ini menunjukkan bahwa kualitas SDM aparatur mempunyai pengaruh positif terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah, dengan daya penentu sebesar 34.70%, artinya bahwa meningkatnya keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah sebesar 34.70% ditentukan dan dipengaruhi oleh Kualitas SDM Aparatur ,sedangkan sisanya sebesar 65.30% ditentukan atau dipengaruhi oleh factor lain.

   Hasil pengujian taraf signifikansi koefisien korelasi dan koefisien determinasi dengan uji statistic- t menunjukka bahwa pengaruh Kualitas SDM Aparatur terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah adalah sigifikan pada taraf 0.01 atau taraf kepercayaan 99%. Dimana hasil uji-t diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{kritit} ($t_{hit} = 4.20 > t_{0.01} = 2.39$). Hasil uji statistic-t tersebut ekuivaen dengan hasil uji statistic –F pada analisis regresi linier sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapatlah dikatakan bahwa hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini berdasarkan kerangka teori dapat diterima kebenarannya secara meyakinkan.

Terbuktinya hipotesis tersebut membenarkan teori yang mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan keberhasilan birokrasi public di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah sangat tergantung pada kualitas SDM aparatur pemerintah itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian sebagaimana telah dikemukakan diatas, *maka dapat ditarik kesimpulan sebagai* berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah Kecamatan Sonder umumnya berkategori sedang
2. Keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah di kecamatan Sonder umumnya terkategori sedang

3. Kualitas SDM aparatur pemerintah Kecamatan Sonder punya pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan daerah di Kecamatan tersebut. Dengan kata lain, tingkat keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah di Kecamatan Sonder yang terindikasi belum maksimal atau masih pada kategori sedang, secara signifikan disebabkan oleh kualitas SDM aparatur kecamatan tersebut yang belum menunjukkan kualitas yang maksimal yaitu masih pada kategori sedang.

B. Saran

Bertolak belakang dari hasil penelitian ini, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diperlukan upaya terus-menerus meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah kecamatan. Untuk itu, aparatur kecamatan perlu diberikan pendidikan dan pelatihan terutama pendidikan da pelatihan teknis dan fungsional
2. Aparatur pemerintah Kecamatan juga dimotivasi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, dengan memberikan kesempatan luas dan bantuan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian:Suatu Penekatan Praktik.* Jakarta: P.T Rineka Cipta.

Mardiasmo. (2002). *"Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Penerbit. ANDI.

Notoatmodjo, S. (1992). *Pengembangan Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua* . Jakarta: Rineka Cipta.

Sudjana. (1996). *Metode Statistik.* Bandung: Tarsito.

Syaukani, G., & Rasyid, R. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wasistiono, S. (2002). *Pendelegasian Kewenangan dan Hubungan Kelembagaan Organisasi Pemerintahan Kecamatan.* Bandung: Pusat Kajian Pemerintahan STPDN.

Sumber Lain :

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah